

# STATISTIK KEUANGAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH

2019



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



# STATISTIK KEUANGAN DAERAH

---

**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**2019**

# STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 2019

Katalog : 7203002.72  
ISSN : 2354-7456  
No. Publikasi : 72540.2006  
Ukuran Buku : 21.4 x 27.9 cm  
Jumlah Halaman : xii + 50 Halaman

Naskah :  
Bidang Statistik Distribusi

Penyunting :  
Bidang Statistik Distribusi

Gambar Kulit :  
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh :  
©Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Dicetak Oleh :

-

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau  
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa  
izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

## **TIM PENYUSUN**

### **Pengarah :**

Drs. Dumangar Hutauruk, M.Si.

### **Penanggungjawab :**

Ir. Sutrisno S. Abusungut, M.Si.

### **Penyunting/Editor :**

Amriany Amir, SP., MP.

### **Penyusun :**

Henry Simanjuntak, SST., M.Si.

<https://sugeng.bps.go.id>



## KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dirilis pada Tahun 2020 disajikan secara series untuk tahun anggaran 2018 - 2019, merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun sebelumnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah.

Data yang disajikan meliputi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sumber utama data berasal dari laporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan laporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2018 - 2019.

Kami ucapkan terima kasih, kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat diselesaikan tepat waktu serta penghargaan secara khusus kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah membantu dalam penyediaan data.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi para pengguna yang membutuhkannya.

Palu, Desember 2020

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**Dumangar Hutauruk**



# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Grafik .....	viii
Daftar Lampiran .....	ix
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Ruang Lingkup dan Sumber Data .....	2
1.3. Konsep dan Definisi .....	3
<b>II. ULASAN RINGKAS</b>	
2.1. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah .....	5
2.2. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah .....	6
2.3. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota .....	7
2.4. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota .....	14
Lampiran .....	21



# DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 – 2019 ..... 6
Grafik 2	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 – 2019 ..... 7
Grafik 3	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 ..... 8
Grafik 4.1	Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai dan Morowali Tahun 2019 ..... 10
Grafik 4.2	Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Donggala dan Toli-toli Tahun 2019..... 11
Grafik 4.3	Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Parigi Moutong dan Tojo Una-una Tahun 2019..... 12
Grafik 4.4	Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara dan Kota Palu Tahun 2019 ..... 13
Grafik 5.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019..... 15
Grafik 6.1	Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai dan Morowali Tahun 2019 ..... 16
Grafik 6.2	Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Donggala dan Toli-toli Tahun 2019..... 17
Grafik 6.3	Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Parigi Moutong dan Tojo Una-una Tahun 2019..... 18
Grafik 6.4	Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara dan Kota Palu Tahun 2019 ..... 20

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 – 2019 ..... 23
Tabel 2	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 – 2019 ..... 24
Tabel 3	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 – 2019 ..... 25
Tabel 4	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 – 2019..... 26
Tabel 5	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 – 2019 ..... 27
Tabel 6	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 – 2019..... 28
Tabel 7	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018 – 2019 ..... 29
Tabel 8	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018 – 2019 ..... 30
Tabel 9	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2018 – 2019 ..... 31
Tabel 10	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2018 – 2019 ..... 32
Tabel 11	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2018 – 2019 ..... 33
Tabel 12	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2018 – 2019 ..... 34
Tabel 13	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-toli Tahun 2018 – 2019 ..... 35

Tabel 14	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-toli Tahun 2018 – 2019 .....	36
Tabel 15	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 – 2019 .....	37
Tabel 16	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 – 2019 .....	38
Tabel 17	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 – 2019 .....	39
Tabel 18	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 – 2019.....	40
Tabel 19	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2018 – 2019 .....	41
Tabel 20	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2018 – 2019 .....	42
Tabel 21	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 – 2019 .....	43
Tabel 22	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 – 2019 .....	44
Tabel 23	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2018 – 2019 .....	45
Tabel 24	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2018 – 2019 .....	46
Tabel 25	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 – 2019.....	47
Tabel 26	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 – 2019 .....	48
Tabel 27	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2018 – 2019 .....	49

Tabel 28	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2018 – 2019 .....	50
----------	--	----

<https://sulteng.bps.go.id>



# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perimbangan keuangan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No 33 tahun 2004 yang merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi dari pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah serta Undang – Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan keuangan pemerintahan di daerah saat ini. Penyelenggaraan kegiatan oleh pemerintah daerah adalah dalam rangka tugas pembantuan yang didanai oleh APBN, sedangkan pelaksanaan desentralisasinya didanai APBD. Perimbangan keuangan dimaksudkan untuk menjaga dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya. Dengan segala kewenangan dan sumber keuangan yang memadai, diharapkan pemerintah daerah lebih leluasa dalam merencanakan pembangunan dan efektif dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah terus diupayakan untuk ditingkatkan sehingga selaras dengan program pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Pembangunan perlu dilaksanakan secara terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dapat terwujud keharmonisan dan keseimbangan pembangunan nasional menuju cita-cita bersama yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut di antaranya adalah dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah dengan asas transparansi dan akuntabel melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dikelola dengan efektif dan efisien.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara bahwa perhitungan perencanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, yaitu dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam rangka keperluan analisis untuk pengambilan keputusan dan memenuhi kelengkapan informasi tentang Keuangan Negara, hasil kompilasi data statistik tentang keuangan daerah sangat bermanfaat, antara lain:

1. Sebagai bahan penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana.
2. Memberi gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Untuk mengetahui potensi dan sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah di bawahnya.

## **1.2 Ruang Lingkup dan Sumber Data**

Data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi diperoleh dari Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan untuk Daerah Kabupaten/Kota diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota (DPPKAD).

Dalam penyajiannya rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hasil kompilasi daftar K-1 dan K-2 yang telah disiapkan oleh BPS RI. Periode pencatatan

mengacu pada tahun fiskal/anggaran, yakni dari bulan Januari sampai dengan Desember.

### **1.3 Konsep dan Definisi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Pemerintah Daerah dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

#### **1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. pendapatan daerah terdiri dari bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, bagian pendapatan asli daerah (PAD), bagian dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/ bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### **2. Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. belanja daerah terdiri atas belanja tak langsung dan belanja langsung. Belanja tak langsung berasal dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung berasal dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

#### **Belanja Tak Langsung**

Belanja tak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program pemerintah.

#### **Belanja Langsung**

Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan yang terkait langsung dengan pelaksanaan program pemerintah.





## II. ULASAN RINGKAS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber keuangan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan sebagai regulator dalam pelayanan masyarakat. Keberhasilan pemerintah daerah dalam memajukan suatu daerah sangat tergantung kebijakan pengalokasian dana APBD untuk pelaksanaan program-program pembangunan. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, APBD dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan daerah sebagai tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki. Selanjutnya bagian dana perimbangan sebagai komponen terbesar pendapatan daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya. Belanja daerah terdiri dari bagian belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dari komposisi belanja daerah, dapat dilihat program prioritas pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

### 2.1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

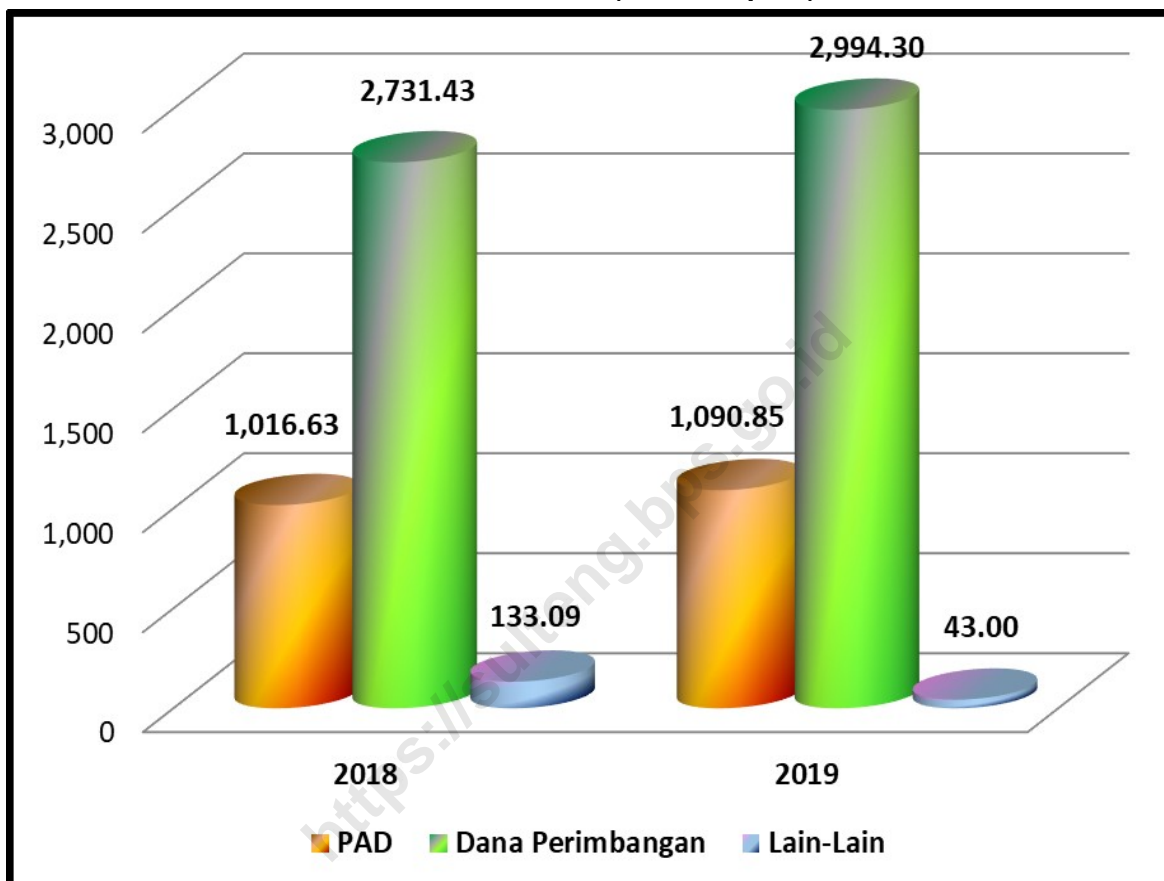
Selama tahun 2019, realisasi pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sejumlah 4.128,15 miliar rupiah atau meningkat 6,36 persen dari tahun 2018. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh peningkatan realisasi pada dana perimbangan dan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing sebesar 9,62 persen dan 7,30 persen. Peningkatan dana perimbangan disebabkan oleh meningkatnya dana alokasi khusus (DAK) sebesar 27,21 persen dan peningkatan dana alokasi umum (DAU) sebesar 3,24 persen. Pada periode yang sama lain-lain pendapatan yang sah turun sebesar 67,69 persen.

Pada tahun 2019 kontribusi terbesar pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan yakni sebesar 72,53 persen dari keseluruhan anggaran pendapatan

daerah, diikuti oleh pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah masing-masing sebesar 26,42 persen dan 1,04 persen.

Grafik 1.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2019 (miliar Rupiah)



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

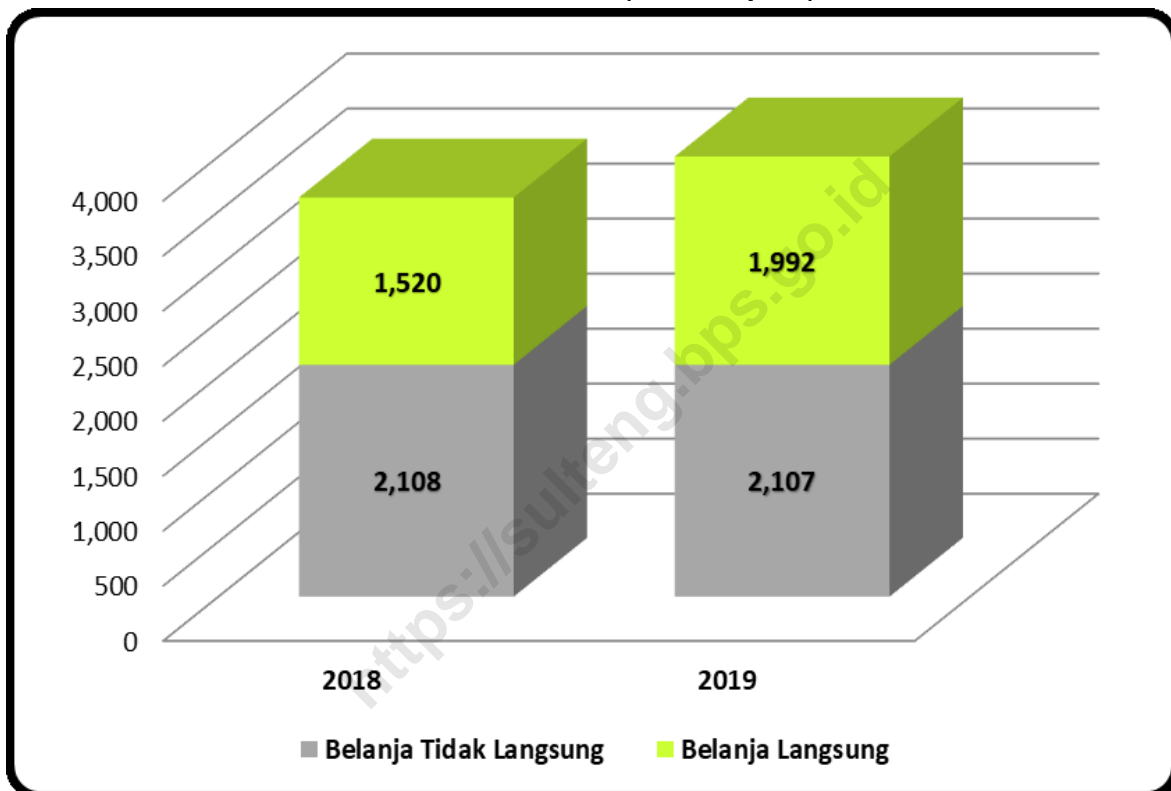
## 2.2. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pada tahun 2019, total realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencapai sejumlah 4.098,77 miliar rupiah, meningkat 12,98 persen dibandingkan realisasi belanja tahun sebelumnya yang mencapai 3.628,01 miliar rupiah. Sebesar 51,40 persen realisasi belanja tersebut terserap pada belanja tidak langsung atau setara dengan 2.106,94 miliar rupiah, sedangkan sebesar 48,60 persen sisanya terserap pada belanja langsung yaitu sejumlah 1.991,83 miliar rupiah. Porsi belanja pegawai keseluruhan baik yang berasal dari belanja langsung maupun belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah

mencapai angka yang cukup besar yakni 32,09 persen atau sejumlah 1.315,44 miliar rupiah, sedangkan alokasi untuk belanja modal dari total nilai belanja daerah hanya sebesar 20,41 persen atau sejumlah 836,62 miliar rupiah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 12,67 persen atau sebesar 459,78 miliar rupiah.

**Grafik 2.**

**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018- 2019 (miliar rupiah)**



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

### 2.3. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

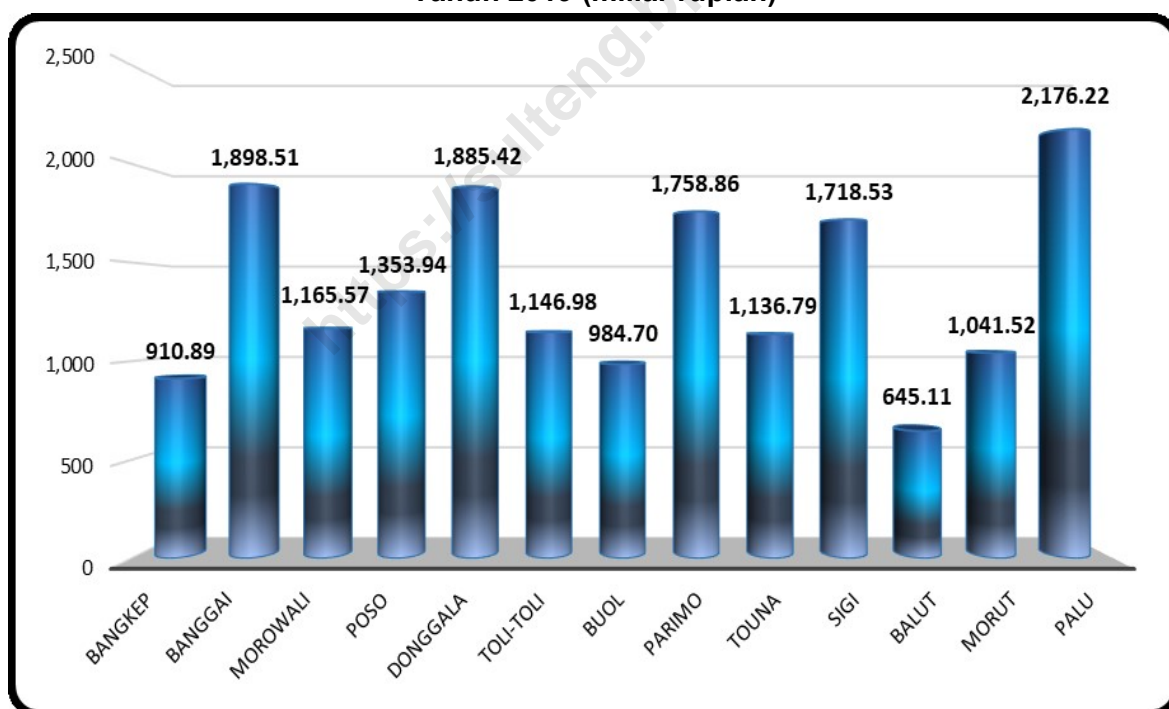
Realisasi pendapatan daerah untuk kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah tahun anggaran 2019 mengalami peningkatan untuk dua belas kabupaten/kota. Peningkatan realisasi pendapatan daerah tertinggi terjadi di Kota Palu yang mencapai 65,36 persen diikuti Kabupaten Donggala yakni sebesar 61,85 persen, dan selanjutnya Kabupaten Sigi sebesar 47,96 persen. Peningkatan anggaran yang cukup besar pada ketiga daerah tersebut disebabkan oleh meningkatnya anggaran pada lain-lain pendapatan daerah yang sah pada sub kelompok pendapatan hibah yang mungkin merupakan bantuan biaya penanggulangan

bencana gempa, tsunami dan likuifaksi yang terjadi pada tahun 2018. Kabupaten Buol menjadi satu-satunya daerah yang mengalami penurunan realisasi pendapatan yaitu sebesar 0,65 persen.

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu wujud nyata keberhasilan pemerintah daerah. Pada tahun 2019 terdapat 10 kabupaten yang mengalami peningkatan PAD, peningkatan PAD tertinggi terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan yakni sebesar 43,10 persen diikuti Kabupaten Donggala sebesar 37,58 persen dan Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 23,96 persen. Sementara tiga kabupaten mengalami penurunan PAD yaitu Kabupaten Buol turun sebesar 14,90 persen, Kabupaten Sigi turun sebesar 11,81 persen, dan Kota Palu turun sebesar 11,77 persen.

**Grafik 3.**

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (miliar rupiah)**



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab./Kota

Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah merupakan salah satu indikasi kemandirian suatu daerah otonomi. Apabila dirinci dari proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah, maka pada tahun 2019 proporsi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Morowali sebesar 19,04 persen, diikuti oleh Kota Palu di urutan kedua sebesar 10,84 persen, dan Kabupaten Parigi Moutong pada urutan

ketiga dengan persentase sebesar 10,60 persen. Kabupaten dengan proporsi PAD terendah terhadap total pendapatan daerah adalah Kabupaten Sigi yang hanya sebesar 2,65 persen.

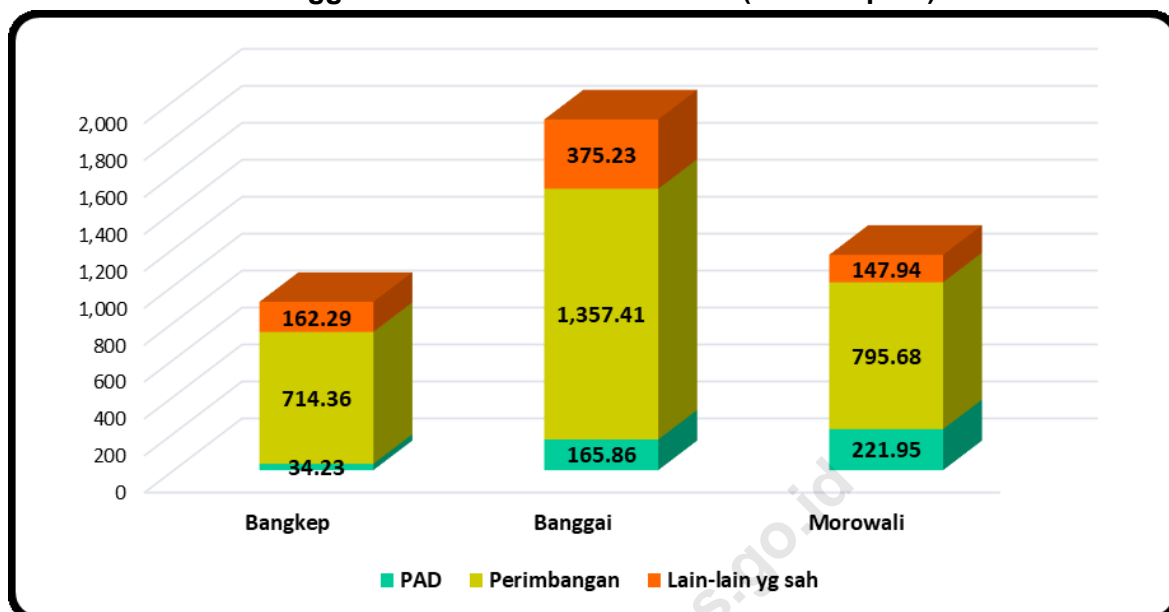
Bila dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) yang merupakan indikator kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah hanya Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah sudah bersifat konsultatif dimana persentase PAD terhadap dana transfer berada pada interval 25 -50 persen dengan persentase masing-masing sebesar 25,09 persen dan 36,43 persen artinya bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat melaksanakan otonomi daerah, selebihnya masih mengikuti pola kemandirian instruktif yang artinya kemampuan keuangan masih sangat rendah sekali.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2019 mencapai 910,89 miliar rupiah, naik sebesar 11,19 persen dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 819,18 miliar rupiah. Bila dicermati struktur pembentuk pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan persentase terbesar berasal dari dana perimbangan yaitu sebesar 78,43 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 17,82 persen, sedangkan pendapatan asli daerah hanya sebesar 3,76 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kabupaten Banggai tahun 2019 tercatat mengalami peningkatan realisasi pendapatan daerah sebesar 2,51 persen yaitu dari 1.852,01 miliar rupiah tahun 2018 menjadi 1.898,51 miliar rupiah pada tahun 2019. Struktur pendapatan daerah Kabupaten Banggai pada tahun 2019 terdiri atas 71,50 persen berasal dari dana perimbangan, 19,76 persen berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta 8,74 persen berasal dari pendapatan asli daerah.

Grafik 4.1.

**Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai dan Morowali Tahun 2019 (miliar rupiah)**



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2018, Kabupaten Morowali pada tahun 2019 mengalami peningkatan realisasi pendapatan daerah yaitu sebesar 6,45 persen. Struktur pendapatan daerah Kabupaten Morowali, didominasi oleh dana perimbangan sebesar 68,27 persen, selanjutnya pendapatan asli daerah sebesar 19,04 persen atau sebesar 221,95 miliar rupiah dari total realisasi pendapatan, dan sisanya sebesar 12,69 persen berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

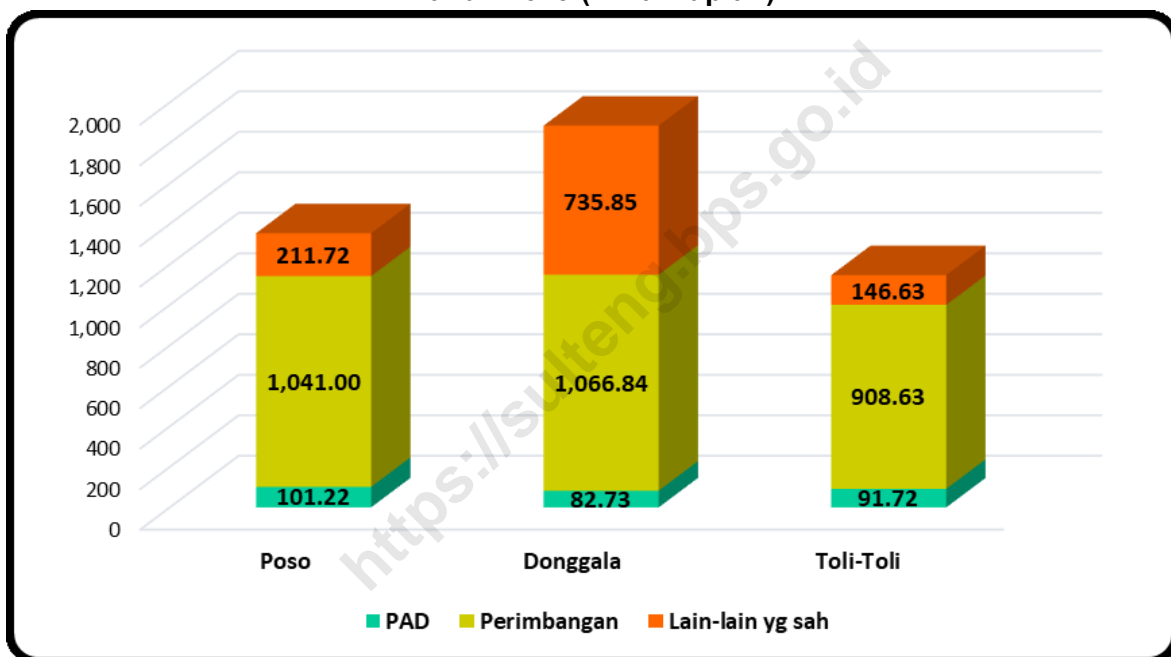
Kabupaten Poso pada tahun 2019 mengalami kenaikan realisasi pendapatan daerah sebesar 3,52 persen yaitu dari 1.307,89 miliar rupiah pada tahun 2018 menjadi 1.353,94 miliar rupiah pada tahun 2019. pendapatan asli daerah Kabupaten Poso pada tahun 2019 sebesar 101,22 miliar rupiah dan memberikan andil sebesar 7,48 persen terhadap realisasi pendapatan daerah Kabupaten Poso. Andil terbesar pendapatan daerah Kabupaten Poso berasal dari dana perimbangan yaitu sebesar 76,89 persen, dan sisanya sebesar 15,64 persen berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada tahun anggaran 2019 Kabupaten Donggala mengalami kenaikan realisasi pendapatan daerah sebesar 61,85 persen, yaitu dari 1.164,90 miliar rupiah pada tahun 2018 menjadi 1.885,42 miliar rupiah pada tahun 2019.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya pendapatan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 259,04 persen, dana perimbangan naik sebesar 18,56 persen, dan pendapatan asli daerah Kabupaten Donggala naik sebesar 37,58 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Struktur pendapatan daerah di Kabupaten Donggala didominasi oleh dana perimbangan sebesar 56,58 persen, diikuti lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 39,03 persen, dan pendapatan asli daerah sebesar 4,39 persen.

**Grafik 4.2.**

**Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Donggala dan Toli-toli Tahun 2019 (miliar rupiah)**



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kabupaten Toli-toli pada tahun 2019 mengalami peningkatan realisasi pendapatan daerah sebesar 10,50 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan asli daerah sebesar 14,21 persen, dana perimbangan naik sebesar 11,29 persen dan Lain-lain pendapatan yang sah naik sebesar 3,84 persen. Kontribusi pendapatan daerah kabupaten Toli-toli terbesar berasal dari dana perimbangan sebesar 79,22 persen, diikuti lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 12,78 persen, dan pendapatan asli daerah sebesar 8,00 persen.

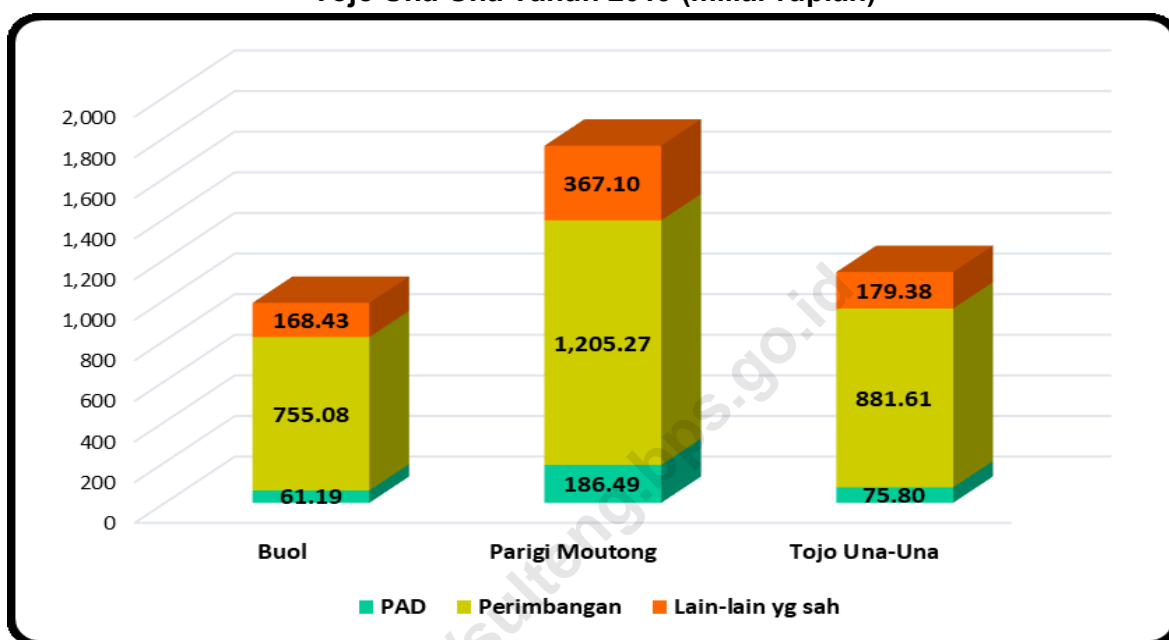
Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buol tahun anggaran 2019 sebesar 984,70 miliar rupiah, turun sebesar 0,65 persen dari tahun sebelumnya sebesar 991,14 miliar rupiah. Berdasarkan sumber pendapatan daerah, dana



perimbangan memberikan andil terbesar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Buol yaitu sebesar 76,68 persen, selanjutnya Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 17,11 persen, dan pendapatan asli daerah sebesar 6,21 persen.

**Grafik 4.3.**

**Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Parigi Moutong dan Tojo Una-Una Tahun 2019 (miliar rupiah)**



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

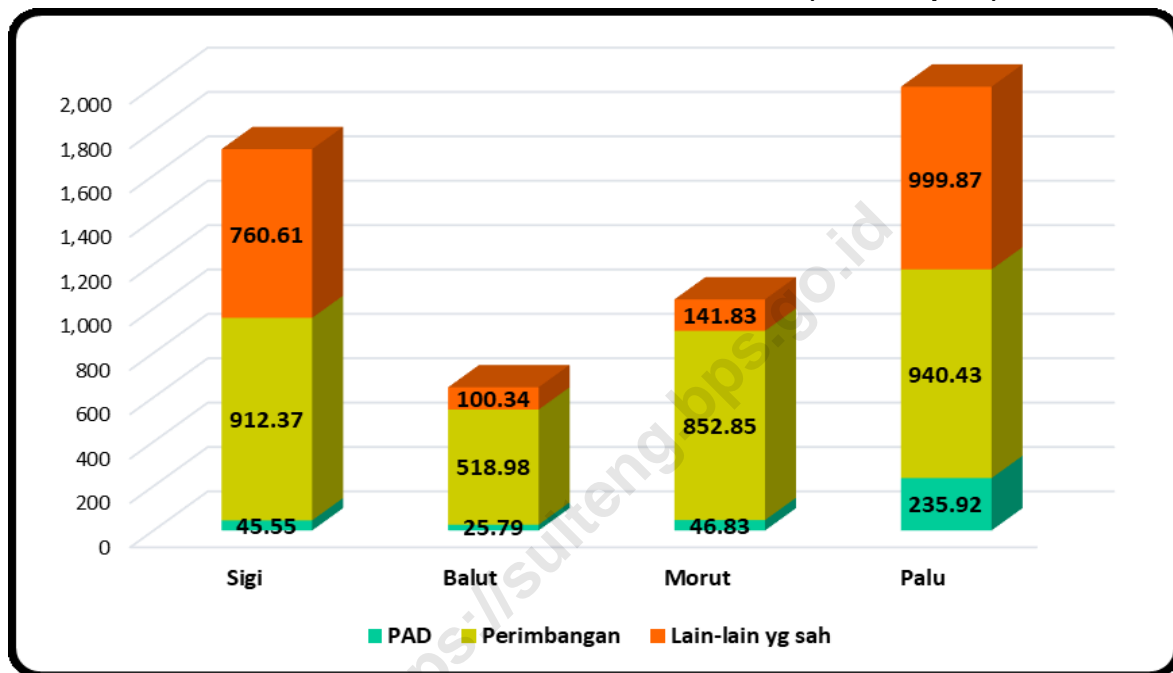
Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2019 mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar 1.758,86 miliar rupiah atau naik sebesar 17,98 persen dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar 1.490,82 miliar rupiah. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya pendapatan asli daerah sebesar 13,95 persen, dana perimbangan naik sebesar 12,36 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah naik sebesar 44,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat struktur pendapatan daerah Kabupaten Parigi Moutong masih didominasi oleh dana perimbangan yaitu sebesar 68,53 persen, diikuti lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 20,87 persen, dan pendapatan asli daerah sebesar 10,60 persen.

Realisasi pendapatan Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2019 sebesar 1.136,79 miliar rupiah atau naik 12,66 persen dibandingkan tahun 2018 sebesar 1.009,03 miliar rupiah. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan masing-masing sebesar 23,96 persen dan sebesar

15,47 persen. Struktur pendapatan daerah Kabupaten Tojo Una-una masih sangat didominasi dana perimbangan yaitu sebesar 77,55 persen, sedangkan bagian pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masing-masing sebesar 6,67 persen dan 15,78 persen.

**Grafik 4.4.**

**Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara, dan Kota Palu Tahun 2019 (miliar rupiah)**



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab./Kota

Realisasi pendapatan Kabupaten Sigi pada tahun 2019 sebesar 1.718,53 miliar rupiah, jumlah ini naik sebesar 47,96 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dilihat dari struktur pembentuk pendapatan daerah Kabupaten Sigi, dana perimbangan mendominasi dengan andil sebesar 53,09 persen, diikuti oleh bagian lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 44,26 persen, sedangkan pendapatan asli daerah hanya memberikan kontribusi sebesar 2,65 persen terhadap total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sigi.

Sebagai kabupaten yang baru terbentuk Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara memiliki pendapatan daerah yang cukup kecil. Kabupaten Banggai Laut memiliki pendapatan daerah sebesar 645,11 miliar rupiah dimana 80,45 persen diantaranya berasal dari dana perimbangan sedangkan lain-lain pendapatan yang sah dan pendapatan asli daerah masing-

masing sebesar 15,55 persen dan 4,00 persen. Keadaan yang hampir sama terjadi di Kabupaten Morowali Utara dimana dari 1.041,52 miliar rupiah pendapatan daerah sebesar 81,89 persen berasal dari dana perimbangan sisanya 13,62 persen adalah lain-lain pendapatan yang sah, dan pendapatan asli daerah memberikan kontribusi sebesar 4,50 persen.

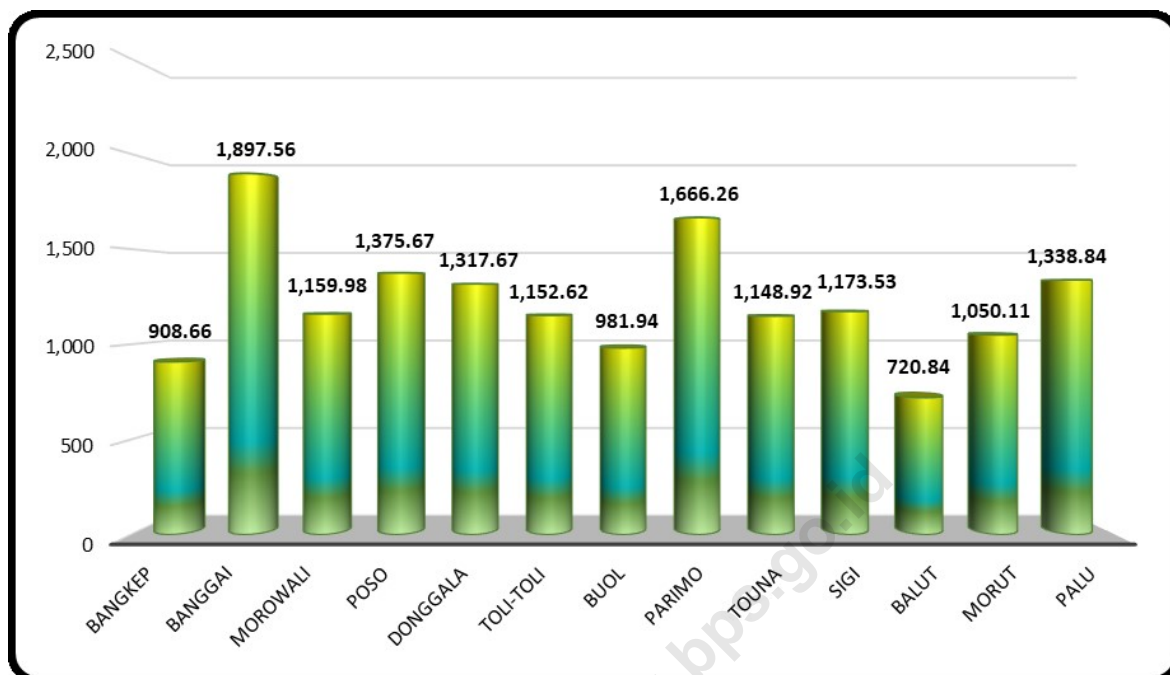
Pendapatan daerah Kota Palu tahun anggaran 2019 sebesar 2.176,22 miliar rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 65,36 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1.316,09 miliar rupiah. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya komponen lain-lain pendapatan yang sah dan dana perimbangan masing-masing sebesar 624,58 persen dan 3,27 persen, sedangkan pendapatan asli daerah menunjukkan penurunan sebesar 11,77 persen. pendapatan asli daerah yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja daerah memiliki andil sebesar 10,84 persen terhadap total pendapatan daerah, sedangkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan andil terhadap total pendapatan daerah Kota Palu masing-masing sebesar 43,21 persen dan sebesar 45,95 persen.

#### **2.4. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota**

Secara umum realisasi belanja daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah tahun anggaran 2019 berfluktuasi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi belanja daerah terjadi di 12 (dua belas) kabupaten/kota, sementara 1 (satu) kabupaten lainnya mengalami penurunan realisasi belanja daerah. Peningkatan realisasi belanja daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Tojo Una-una yang mencapai 14,56 persen, diikuti Kabupaten Banggai Laut yang mencapai 14,52 persen, dan Kabupaten Donggala sebesar 13,48 persen. Kabupaten Buol menjadi satu-satunya kabupaten yang mengalami penurunan realisasi belanja yaitu sebesar 0,17 persen.

Grafik 5.

**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Tahun 2019 (miliar rupiah)**



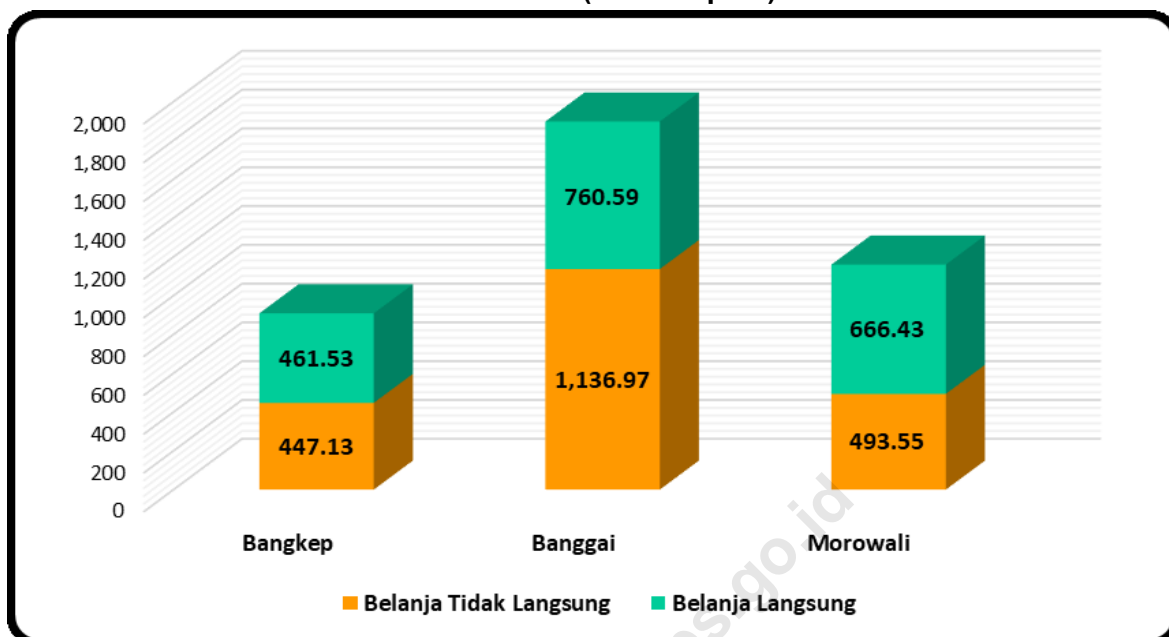
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab./Kota.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2019 mencapai 908,66 miliar rupiah naik 10,18 persen dari tahun sebelumnya sebesar 824,69 miliar rupiah. Komposisi belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 49,21 persen belanja tidak langsung atau setara dengan 447,13 miliar rupiah dan 50,79 persen belanja langsung atau setara dengan 465,53 miliar rupiah. Komponen belanja langsung didominasi oleh belanja modal yang mencapai 53,09 persen, kemudian diikuti oleh belanja barang dan jasa sebesar 36,50 persen dan 10,41 persen sisanya dipergunakan untuk porsi belanja pegawai.

Kabupaten Banggai tahun 2019 mencatat realisasi belanja daerah sebesar 1.897,56 miliar rupiah, meningkat sebesar 1,73 persen dibandingkan periode sebelumnya sebesar 1.865,24 miliar rupiah. Sebesar 59,92 persen direalisasikan untuk belanja tidak langsung sedangkan 40,08 persen untuk belanja langsung. dari 760,59 miliar rupiah belanja langsung, sebesar 58,07 persen digunakan untuk belanja barang dan jasa sedangkan belanja modal dan belanja pegawai masing-masing sebesar 36,13 persen dan 5,81 persen.

**Grafik 6.1.**

**Struktur Belanja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai dan Morowali Tahun 2019 (miliar rupiah)**



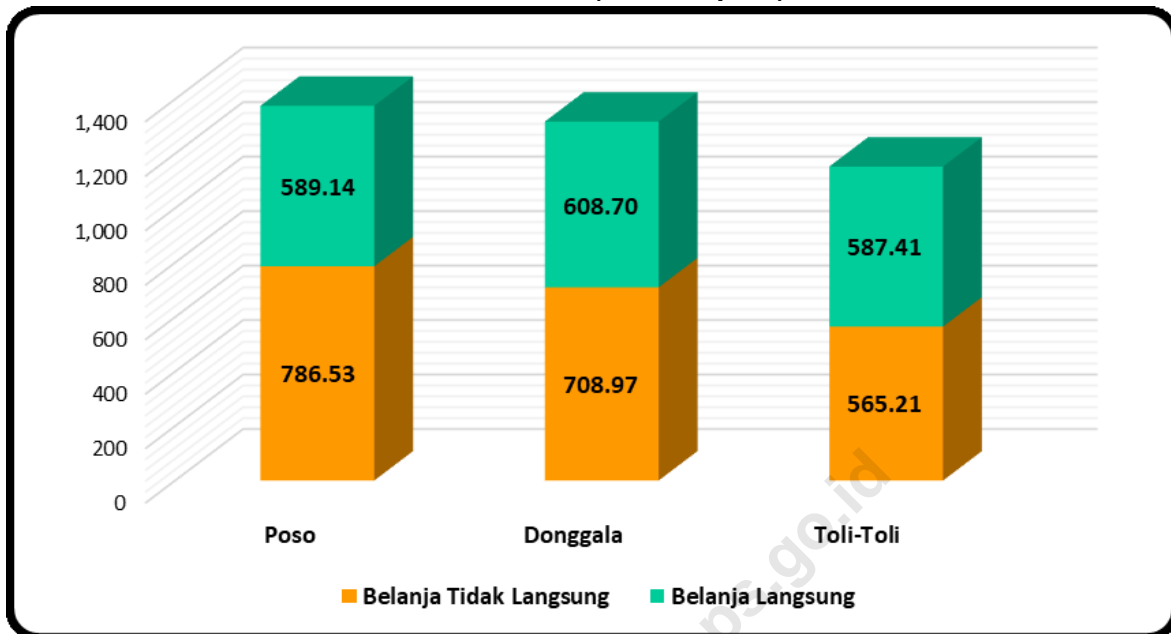
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Pada tahun 2019 belanja daerah Kabupaten Morowali yang terealisasi sebesar 1.158,98 miliar rupiah, naik 6,38 persen dari tahun sebelumnya. Sebesar 42,55 persen dari total belanja digunakan untuk belanja tidak langsung dan 57,45 persen untuk belanja langsung. Struktur belanja langsung terdiri dari 42,04 persen belanja modal, diikuti 39,77 persen belanja barang dan jasa, dan sisanya 18,19 persen digunakan untuk belanja pegawai.

Kabupaten Poso tahun 2019 menghabiskan anggaran sebesar 1.375,67 miliar rupiah untuk belanja daerah atau mengalami kenaikan sebesar 7,72 persen dibandingkan belanja tahun sebelumnya. Porsi terbesar dialokasikan untuk belanja tidak langsung yaitu sebesar 57,17 persen, sedangkan belanja langsung mendapat porsi sebesar 42,83 persen. belanja langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program pemerintah sebesar 589,14 miliar rupiah digunakan dengan proporsi untuk belanja pegawai sebesar 8,61 persen, belanja barang dan jasa sebesar 39,17 persen dan belanja modal sebesar 52,22 persen.

Grafik 6.2.

**Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Donggala dan Toli-toli Tahun 2019 (miliar rupiah)**



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

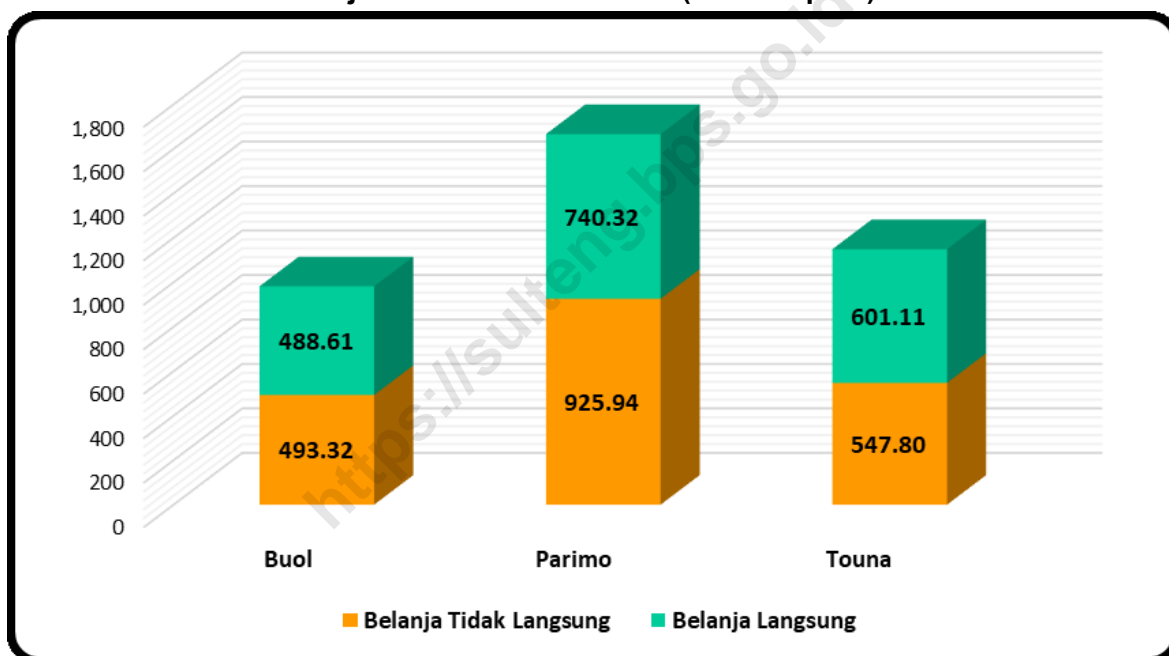
Realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2019 sebesar 1.317,67 miliar rupiah, naik 13,84 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.161,14 miliar rupiah. Porsi belanja Kabupaten Donggala sebesar 53,80 persen dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan sebesar 46,20 persen dialokasikan untuk belanja langsung. Dari total belanja langsung sebesar 608,70 miliar rupiah sebesar 49,39 persen digunakan untuk belanja barang dan jasa, selanjutnya sebesar 40,29 persen untuk belanja modal, dan sisanya 10,32 persen untuk belanja pegawai.

Total belanja daerah Kabupaten Toli-toli Tahun 2019 tercatat sebesar 1.152,62 miliar rupiah naik sebesar 13,03 persen dari realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar 1.019,78 miliar rupiah. Dari total belanja tersebut Kabupaten Toli-toli mengalokasikan sebesar 49,04 persen untuk belanja tidak langsung dan sisanya sebesar 50,96 persen untuk belanja langsung. Sebesar 42,96 persen dari total 587,41 miliar rupiah belanja langsung direalisasikan untuk belanja barang dan jasa, sedangkan belanja pegawai dan belanja modal masing-masing sebesar 8,10 persen dan 48,94 persen.

Pada tahun 2018 Realisasi belanja daerah Kabupaten Buol mencapai 983,58 miliar rupiah turun menjadi 981,94 miliar rupiah dengan penurunan sebesar 0,17 persen pada tahun 2019. Realisasi belanja tersebut dimanfaatkan untuk porsi belanja langsung sebesar 49,76 persen dan belanja tidak langsung sebesar 50,24 persen. Dari sebesar sebesar 488,61 miliar rupiah total belanja langsung, sebesar 46,55 persen digunakan untuk belanja modal, untuk belanja barang dan jasa sebesar 44,29 persen, dan untuk belanja pegawai sebesar 9,16 persen.

**Grafik 6.3.**

**Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Parigi Moutong dan Tojo Una-Una Tahun 2019 (miliar rupiah)**



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Realisasi Belanja Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2019 sebesar 1.666,26 miliar rupiah atau naik 11,84 persen dari tahun 2018 sebesar 1.489,91 miliar rupiah. Belanja tidak langsung terealisasi sebesar 925,94 miliar rupiah atau 55,57 persen dari total belanja, sedangkan belanja langsung sebesar 740,32 miliar rupiah. Alokasi dari total belanja langsung sebesar 51,56 persen digunakan untuk belanja barang dan jasa, sedangkan belanja pegawai dan belanja modal masing-masing mendapat porsi sebesar 9,80 persen dan 38,64 persen.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019 mencapai 1.148,92 miliar rupiah atau naik 14,56 persen dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1.002,94 miliar rupiah. Pada tahun 2019 realisasi belanja tersebut dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung sebesar 547,80 miliar rupiah, sedangkan bagian belanja langsung sebesar 601,11 miliar rupiah. Sebesar 52,32 persen total belanja daerah dimanfaatkan untuk belanja langsung dengan distribusi belanja pegawai sebesar 9,68 persen, belanja barang dan jasa sebesar 45,88 persen, dan belanja modal sebesar 44,44 persen.

Anggaran belanja daerah Kabupaten Sigi tahun 2019 terealisasi sejumlah 1.173,53 miliar rupiah naik sebesar 5,49 persen. belanja tidak langsung tercatat sejumlah 681,30 miliar rupiah dan belanja langsung sejumlah 492,23 miliar rupiah. Total belanja langsung dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal masing-masing sebesar 0,92 persen, 53,33 persen dan 45,75 persen.

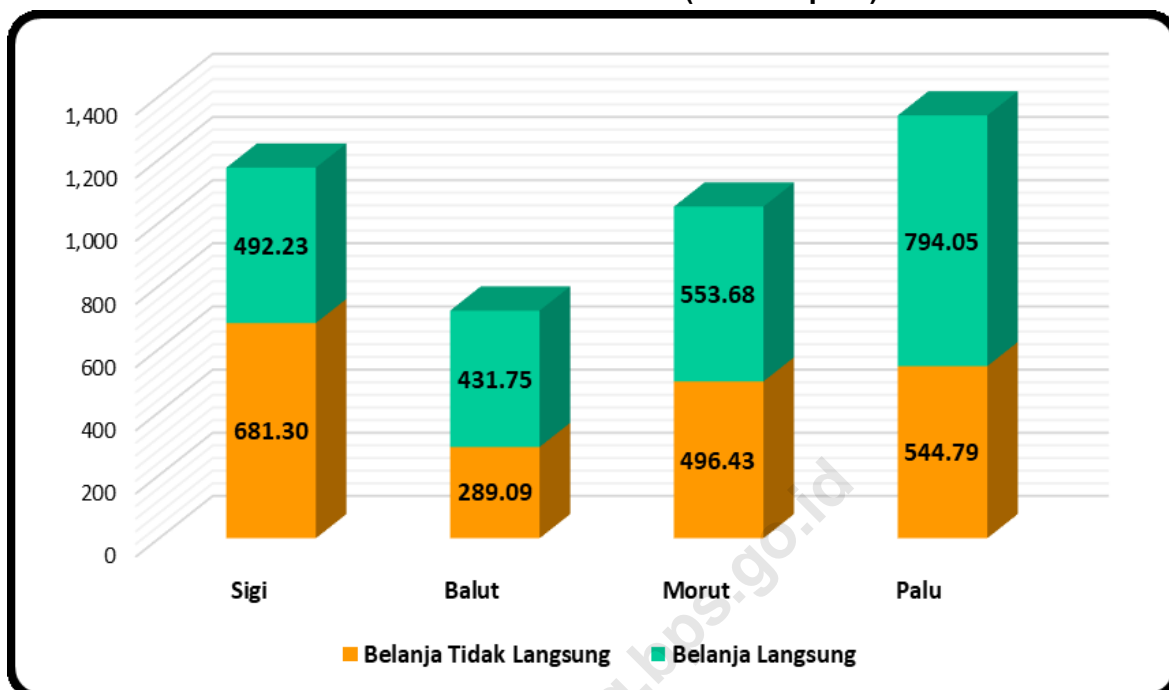
Anggaran belanja daerah Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2019 tercatat sebesar 720,84 miliar rupiah naik 14,52 persen dari tahun sebelumnya sebesar 629,44 miliar rupiah. Sebesar 40,10 persen dari total belanja daerah digunakan untuk belanja tidak langsung sedangkan 59,90 persen digunakan untuk belanja langsung. Dari 431,75 miliar rupiah dana yang dialokasikan untuk belanja langsung, sebesar 13,53 persen digunakan untuk belanja pegawai, 31,33 persen untuk belanja barang dan jasa, dan sisanya 55,14 persen untuk belanja modal.

Kabupaten Morowali Utara merealisasikan anggaran belanja sebesar 1.050,11 miliar rupiah pada tahun 2019. Total anggaran untuk belanja tidak langsung sebesar 496,43 miliar rupiah atau sebesar 47,27 persen dari total belanja daerah, sedangkan belanja langsung sebesar 553,68 miliar rupiah atau 52,73 persen dari belanja daerah. Adapun belanja langsung yang digunakan untuk belanja pegawai sebesar 42,62 miliar rupiah atau sebesar 7,70 persen. Sedangkan yang digunakan untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal masing-masing sebesar 41,95 persen dan 50,36 persen.



Grafik 6.4.

**Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara dan Kota Palu Tahun 2019 (miliar rupiah)**



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab./Kota

Realisasi belanja daerah Kota Palu tahun 2019 sejumlah 1.338,84 miliar rupiah, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 12,36 persen dari tahun 2018 yang sebesar 1.191,55 miliar rupiah. Porsi belanja langsung Tahun 2019 mencapai 794,05 miliar rupiah atau 59,31 persen dari total belanja daerah, sedangkan 40,69 persen sisanya direalisasikan untuk belanja tidak langsung. Porsi terbesar dari belanja langsung adalah untuk belanja barang dan jasa yang mencapai 415,79 miliar rupiah atau 52,36 persen. Sementara itu belanja pegawai dan belanja modal masing-masing terealisasi sebesar 65,15 miliar rupiah (8,21 persen) dan 313,10 miliar rupiah (39,43 persen).

# LAMPIRAN

<https://sulteng.br.id>



Tabel 1.

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENDAPATAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Pendapatan Daerah</b>	3.881.148.079	4.128.153.121
1. Pendapatan Asli Daerah	1.016.628.664	1.090.854.785
1.1. Pajak Daerah	835.456.980	896.321.262
1.2. Retribusi Daerah	11.225.203	12.670.321
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.907.254	18.375.396
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	153.039.227	163.487.806
2. Dana Perimbangan	2.731.430.164	2.994.301.818
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	65.512.132	51.489.956
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	130.835.478	98.123.994
2.3. Dana Alokasi Umum	1.586.163.908	1.637.588.970
2.4. Dana Alokasi Khusus	948.918.647	1.207.098.898
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	133.089.252	42.996.518
<b>B. Pembiayaan Daerah</b>	186.399.754	400.556.405
<b>JUMLAH</b>	4.067.547.834	4.528.709.526

Tabel 2.

**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENGELUARAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Belanja Daerah</b>	3.628.013.038	4.098.771.219
1. Belanja Tidak Langsung	2.107.589.143	2.106.936.475
1.1. Belanja Pegawai	1.213.130.404	1.206.556.023
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	474.819.970	461.119.320
1.5. Belanja Bantuan Sosial	1.184.500	824.000
1.6. Belanja Bagi Hasil	406.143.965	419.070.468
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	12.072.855	19.366.665
1.8. Belanja Tidak Terduga	237.450	-
2. Belanja Langsung	1.520.423.895	1.991.834.744
2.1. Belanja Pegawai	105.802.142	108.887.276
2.2. Belanja Barang dan Jasa	954.840.819	1.046.327.641
2.3. Belanja Modal	459.780.934	836.619.828
<b>B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan</b>	439.534.796	429.938.306
<b>JUMLAH</b>	4.067.547.834	4.528.709.526

Tabel 3.

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENDAPATAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Pendapatan Daerah</b>	819.184.420	910.888.769
1. Pendapatan Asli Daerah	23.922.233	34.231.612
1.1. Pajak Daerah	5.632.812	6.940.777
1.2. Retribusi Daerah	8.267.733	14.740.564
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.155.602	1.319.993
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.866.086	11.230.278
2. Dana Perimbangan	658.206.306	714.364.857
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	7.442.018	7.012.407
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	20.904.492	14.358.493
2.3. Dana Alokasi Umum	465.346.799	490.735.851
2.4. Dana Alokasi Khusus	164.512.997	202.258.106
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	137.055.881	162.292.300
<b>B. Pembiayaan Daerah</b>	42.037.945	33.284.424
<b>JUMLAH</b>	<b>861.222.365</b>	<b>944.173.193</b>

Tabel 4.

**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENGELUARAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Belanja Daerah</b>	824.687.940	908.657.145
1. Belanja Tidak Langsung	410.051.486	447.126.766
1.1. Belanja Pegawai	254.970.913	276.208.551
1.2. Belanja Bunga		-
1.3. Belanja Subsidi		-
1.4. Belanja Hibah	3.380.400	3.140.000
1.5. Belanja Bantuan Sosial	369.000	270.000
1.6. Belanja Bagi Hasil	912.297	1.377.974
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	149.716.742	165.381.221
1.8. Belanja Tidak Terduga	702.134	749.020
2. Belanja Langsung	414.636.454	461.530.379
2.1. Belanja Pegawai	46.886.907	48.065.008
2.2. Belanja Barang dan Jasa	167.465.859	168.442.691
2.3. Belanja Modal	200.283.688	245.022.680
<b>C. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan</b>	36.534.425	35.516.048
<b>JUMLAH</b>	861.222.365	944.173.193

Tabel 5.

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENDAPATAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Pendapatan Daerah</b>	1.852.008.921	1.898.506.690
1. Pendapatan Asli Daerah	135.426.631	165.863.779
1.1. Pajak Daerah	43.424.956	55.575.989
1.2. Retribusi Daerah	9.765.452	12.258.213
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.591.878	2.830.646
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	79.644.345	95.198.931
2. Dana Perimbangan	1.405.113.853	1.357.410.270
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	69.452.207	72.153.048
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	217.006.962	116.806.196
2.3. Dana Alokasi Umum	869.604.156	901.030.313
2.4. Dana Alokasi Khusus	249.050.528	267.420.714
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	311.468.437	375.232.641
<b>B. Pembiayaan Daerah</b>	30.644.861	13.179.317
<b>JUMLAH</b>	1.882.653.782	1.911.686.007



Tabel 6.

**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENGELUARAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Belanja Daerah</b>	1.865.244.053	1.897.560.084
1. Belanja Tidak Langsung	1.092.613.635	1.136.967.890
1.1. Belanja Pegawai	731.868.493	754.339.291
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	302.994	403.020
1.4. Belanja Hibah	19.949.533	18.564.000
1.5. Belanja Bantuan Sosial	-	2.161.750
1.6. Belanja Bagi Hasil	8.066.700	8.506.700
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	332.308.564	352.493.129
1.8. Belanja Tidak Terduga	117.351	500.000
2. Belanja Langsung	772.630.418	760.592.195
2.1. Belanja Pegawai	36.724.474	44.156.149
2.2. Belanja Barang dan Jasa	433.308.322	441.648.839
2.3. Belanja Modal	302.597.621	274.787.206
<b>D. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan</b>	17.409.730	14.125.923
<b>JUMLAH</b>	1.882.653.782	1.911.686.007

Tabel 7.

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENDAPATAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Pendapatan Daerah</b>	1.094.918.270	1.165.567.038
1. Pendapatan Asli Daerah	181.232.941	221.946.740
1.1. Pajak Daerah	45.496.062	67.145.103
1.2. Retribusi Daerah	74.914.511	103.687.254
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.521.872	1.679.958
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	59.300.496	49.434.425
2. Dana Perimbangan	766.396.332	795.684.414
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	14.480.399	12.362.590
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	54.251.915	67.437.913
2.3. Dana Alokasi Umum	498.783.134	522.346.674
2.4. Dana Alokasi Khusus	198.880.884	193.537.237
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	147.288.997	147.935.885
<b>B. Pembiayaan Daerah</b>	2.320.321	5.194.627
<b>JUMLAH</b>	1.097.238.591	1.170.761.666

Tabel 8.

**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENGELUARAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Belanja Daerah</b>	1.090.373.004	1.159.976.227
1. Belanja Tidak Langsung	444.025.276	493.546.422
1.1. Belanja Pegawai	256.801.662	285.153.387
1.2. Belanja Bunga	1.538.345	1.389.236
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	44.890.252	1.535.000
1.5. Belanja Bantuan Sosial	922.810	538.000
1.6. Belanja Bagi Hasil	-	17.587.373
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	136.838.307	187.094.176
1.8. Belanja Tidak Terduga	3.033.900	249.250
2. Belanja Langsung	646.347.728	666.429.805
2.1. Belanja Pegawai	89.775.670	121.220.998
2.2. Belanja Barang dan Jasa	248.881.910	265.064.479
2.3. Belanja Modal	307.690.148	280.144.328
<b>E. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan</b>	6.865.587	10.785.439
<b>JUMLAH</b>	1.097.238.591	1.170.761.666

Tabel 9.

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENDAPATAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Pendapatan Daerah</b>	1.307.886.138	1.353.935.611
1. Pendapatan Asli Daerah	93.858.396	101.220.106
1.1. Pajak Daerah	18.915.571	19.641.775
1.2. Retribusi Daerah	8.697.897	9.760.036
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.419.089	2.401.727
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	63.825.839	69.416.567
2. Dana Perimbangan	1.032.568.226	1.040.998.989
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	11.108.335	7.870.657
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	22.700.900	15.175.501
2.3. Dana Alokasi Umum	723.089.621	752.954.397
2.4. Dana Alokasi Khusus	275.669.370	264.998.433
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	181.459.516	211.716.516
<b>B. Pembiayaan Daerah</b>	20.674.506	46.117.370
<b>JUMLAH</b>	1.328.560.644	1.400.052.981

Tabel 10.

**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENGELUARAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Belanja Daerah</b>	1.277.116.773	1.375.665.839
1. Belanja Tidak Langsung	732.562.836	786.526.629
1.1. Belanja Pegawai	526.950.246	561.350.728
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	10.391.258	8.076.400
1.5. Belanja Bantuan Sosial	3.363.239	6.104.302
1.6. Belanja Bagi Hasil	3.532.290	3.192.074
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	187.552.716	207.640.820
1.8. Belanja Tidak Terduga	773.087	162.305
2. Belanja Langsung	544.553.937	589.139.209
2.1. Belanja Pegawai	44.104.857	50.735.557
2.2. Belanja Barang dan Jasa	275.760.251	230.782.441
2.3. Belanja Modal	224.688.829	307.621.211
<b>F. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan</b>	51.443.871	24.387.143
<b>JUMLAH</b>	1.328.560.644	1.400.052.981

Tabel 11.

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENDAPATAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Pendapatan Daerah</b>	1.164.902.561	1.885.423.206
1. Pendapatan Asli Daerah	60.135.252	82.731.307
1.1. Pajak Daerah	28.324.968	38.303.636
1.2. Retribusi Daerah	1.850.179	2.491.847
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.305.235	2.288.690
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.654.871	39.647.134
2. Dana Perimbangan	899.815.215	1.066.838.810
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	10.276.304	8.957.711
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	21.157.544	17.198.127
2.3. Dana Alokasi Umum	659.731.826	699.139.595
2.4. Dana Alokasi Khusus	208.649.541	341.543.377
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	204.952.094	735.853.089
<b>B. Pembiayaan Daerah</b>	4.189.931	3.564.936
<b>JUMLAH</b>	1.169.092.492	1.888.988.142

Tabel 12.

**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENGELUARAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Belanja Daerah</b>	1.161.139.685	1.317.674.206
1. Belanja Tidak Langsung	710.381.093	708.969.883
1.1. Belanja Pegawai	472.115.068	478.866.528
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	37.873.545	4.110.000
1.5. Belanja Bantuan Sosial	2.849.716	5.576.380
1.6. Belanja Bagi Hasil	-	2.966.914
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	190.990.197	217.450.061
1.8. Belanja Tidak Terduga	6.552.568	-
2. Belanja Langsung	450.758.592	608.704.323
2.1. Belanja Pegawai	59.795.036	62.807.635
2.2. Belanja Barang dan Jasa	243.485.465	300.658.371
2.3. Belanja Modal	147.478.090	245.238.317
<b>G. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan</b>	7.952.808	571.313.936
<b>JUMLAH</b>	1.169.092.492	1.888.988.142

Tabel 13.

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-toli  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENDAPATAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Pendapatan Daerah</b>	1.037.997.709	1.146.983.898
1. Pendapatan Asli Daerah	80.312.116	91.724.083
1.1. Pajak Daerah	16.543.712	18.165.639
1.2. Retribusi Daerah	4.494.775	5.186.052
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.853.092	2.779.771
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	56.420.537	65.592.621
2. Dana Perimbangan	816.482.058	908.631.647
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	26.238.034	6.809.764
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.658.643	14.529.016
2.3. Dana Alokasi Umum	618.784.625	645.904.108
2.4. Dana Alokasi Khusus	165.800.756	241.388.759
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	141.203.535	146.628.168
<b>B. Pembiayaan Daerah</b>	2.208.764	18.450.183
<b>JUMLAH</b>	1.040.206.473	1.165.434.081



Tabel 14.

**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-toli  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENGELUARAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Belanja Daerah</b>	1.019.779.241	1.152.615.934
1. Belanja Tidak Langsung	550.215.081	565.207.343
1.1. Belanja Pegawai	405.643.533	412.601.355
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	7.211.243	11.283.943
1.5. Belanja Bantuan Sosial	1.023.986	3.580.000
1.6. Belanja Bagi Hasil	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	135.221.523	137.342.101
1.8. Belanja Tidak Terduga	1.114.796	399.944
2. Belanja Langsung	469.564.160	587.408.591
2.1. Belanja Pegawai	47.296.112	47.564.128
2.2. Belanja Barang dan Jasa	238.647.029	252.343.456
2.3. Belanja Modal	183.621.019	287.501.007
<b>H. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan</b>	20.427.232	12.818.147
<b>JUMLAH</b>	1.040.206.473	1.165.434.081

Tabel 15.

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENDAPATAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Pendapatan Daerah</b>	991.137.059	984.698.721
1. Pendapatan Asli Daerah	71.898.558	61.186.560
1.1. Pajak Daerah	7.067.101	7.854.799
1.2. Retribusi Daerah	2.343.026	2.261.662
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.692.301	1.864.080
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60.796.129	49.206.019
2. Dana Perimbangan	754.100.548	755.077.202
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	10.813.904	7.513.760
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	22.361.711	14.740.053
2.3. Dana Alokasi Umum	528.033.354	545.085.183
2.4. Dana Alokasi Khusus	192.891.579	187.738.206
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	165.137.953	168.434.958
<b>B. Pembiayaan Daerah</b>	7.486.035	6.750.844
<b>JUMLAH</b>	998.623.094	991.449.565

Tabel 16.

**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENGELUARAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Belanja Daerah</b>	983.582.356	981.939.170
1. Belanja Tidak Langsung	453.615.005	493.324.831
1.1. Belanja Pegawai	296.505.261	332.292.465
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	9.036.540	5.146.260
1.5. Belanja Bantuan Sosial	9.043.000	4.327.000
1.6. Belanja Bagi Hasil	897.205	955.799
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	137.280.755	150.483.550
1.8. Belanja Tidak Terduga	852.244	119.758
2. Belanja Langsung	529.967.351	488.614.339
2.1. Belanja Pegawai	53.055.483	44.777.730
2.2. Belanja Barang dan Jasa	207.058.594	216.408.506
2.3. Belanja Modal	269.853.275	227.428.103
<b>I. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan</b>	15.040.738	9.510.395
<b>JUMLAH</b>	998.623.094	991.449.565

Tabel 17.

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENDAPATAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Pendapatan Daerah</b>	1.490.820.673	1.758.859.994
1. Pendapatan Asli Daerah	163.657.795	186.487.512
1.1. Pajak Daerah	15.478.606	17.065.029
1.2. Retribusi Daerah	12.744.332	14.745.388
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.152.608	1.616.146
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	134.282.249	153.060.949
2. Dana Perimbangan	1.072.722.650	1.205.269.677
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	9.994.831	9.116.960
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	22.396.264	18.942.884
2.3. Dana Alokasi Umum	749.704.872	786.953.211
2.4. Dana Alokasi Khusus	290.626.683	390.256.622
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	254.440.228	367.102.805
<b>B. Pembiayaan Daerah</b>	57.807.326	46.375.057
<b>JUMLAH</b>	1.548.627.999	1.805.235.051

Tabel 18.

**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENGELUARAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Belanja Daerah</b>	1.489.909.477	1.666.258.286
1. Belanja Tidak Langsung	875.591.184	925.942.253
1.1. Belanja Pegawai	508.180.843	567.055.412
1.2. Belanja Bunga	735.726	639.483
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	66.504.523	29.915.183
1.5. Belanja Bantuan Sosial	9.826.785	6.543.500
1.6. Belanja Bagi Hasil	2.106.744	2.382.098
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	287.694.207	319.183.688
1.8. Belanja Tidak Terduga	542.356	222.889
2. Belanja Langsung	614.318.293	740.316.033
2.1. Belanja Pegawai	81.524.141	72.572.935
2.2. Belanja Barang dan Jasa	325.355.664	381.686.797
2.3. Belanja Modal	207.438.488	286.056.301
<b>J. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan</b>	931.928.263	138.976.765
<b>JUMLAH</b>	2.421.837.740	1.805.235.051

Tabel 19.

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENDAPATAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Pendapatan Daerah</b>	1.009.031.688	1.136.792.768
1. Pendapatan Asli Daerah	61.148.550	75.800.498
1.1. Pajak Daerah	11.368.342	13.162.850
1.2. Retribusi Daerah	2.163.671	2.990.870
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.165.613	2.150.070
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.450.924	57.496.708
2. Dana Perimbangan	763.486.383	881.607.291
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	8.369.699	6.383.000
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	23.097.136	15.426.608
2.3. Dana Alokasi Umum	567.372.983	598.208.500
2.4. Dana Alokasi Khusus	164.646.565	261.589.184
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	184.396.755	179.384.978
<b>B. Pembiayaan Daerah</b>	39.802.096	45.898.700
<b>JUMLAH</b>	<b>1.048.833.784</b>	<b>1.182.691.468</b>

Tabel 20.

**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENGELUARAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Belanja Daerah</b>	1.002.935.084	1.148.916.606
1. Belanja Tidak Langsung	497.903.460	547.802.349
1.1. Belanja Pegawai	315.457.901	348.765.292
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	295.447	199.382
1.4. Belanja Hibah	10.181.529	11.233.980
1.5. Belanja Bantuan Sosial	5.650.000	2.692.500
1.6. Belanja Bagi Hasil	1.132.391	1.329.979
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	164.943.701	183.581.206
1.8. Belanja Tidak Terduga	242.491	10
2. Belanja Langsung	505.031.624	601.114.257
2.1. Belanja Pegawai	60.321.692	58.165.771
2.2. Belanja Barang dan Jasa	249.710.036	275.786.759
2.3. Belanja Modal	194.999.895	267.161.726
<b>K. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan</b>	45.898.700	33.774.863
<b>JUMLAH</b>	1.048.833.784	1.182.691.469

Tabel 21.

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENDAPATAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Pendapatan Daerah</b>	1.161.475.656	1.718.525.610
1. Pendapatan Asli Daerah	51.652.716	45.550.972
1.1. Pajak Daerah	7.639.413	10.011.837
1.2. Retribusi Daerah	2.110.754	2.125.419
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	817.513	860.103
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41.085.036	32.553.613
2. Dana Perimbangan	927.246.615	912.367.787
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	9.388.787	6.828.031
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	27.517.475	15.506.753
2.3. Dana Alokasi Umum	634.133.821	649.671.968
2.4. Dana Alokasi Khusus	256.206.532	240.361.035
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	182.576.325	760.606.851
<b>B. Pembiayaan Daerah</b>	32.215.800	64.293.487
<b>JUMLAH</b>	1.193.691.456	1.782.819.097



Tabel 22.

**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENGELUARAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Belanja Daerah</b>	1.112.428.389	1.173.526.648
1. Belanja Tidak Langsung	656.602.825	681.295.829
1.1. Belanja Pegawai	440.811.276	443.848.735
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	7.922.400	10.663.800
1.5. Belanja Bantuan Sosial	10.135.471	10.070.575
1.6. Belanja Bagi Hasil	1.383.343	1.035.410
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	194.350.335	213.750.732
1.8. Belanja Tidak Terduga	2.000.000	1.926.577
2. Belanja Langsung	455.825.564	492.230.819
2.1. Belanja Pegawai	35.596.241	4.538.747
2.2. Belanja Barang dan Jasa	268.619.188	262.519.422
2.3. Belanja Modal	151.610.135	225.172.650
<b>L. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan</b>	81.263.067	609.292.449
<b>JUMLAH</b>	1.193.691.456	1.782.819.097

Tabel 23.

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENDAPATAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Pendapatan Daerah</b>	607.926.367	645.105.122
1. Pendapatan Asli Daerah	21.776.179	25.785.000
1.1. Pajak Daerah	5.265.630	5.759.871
1.2. Retribusi Daerah	7.659.918	10.966.417
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	233.726	341.366
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.616.905	8.717.346
2. Dana Perimbangan	513.644.852	518.981.018
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	6.818.041	6.137.544
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	20.990.401	14.157.322
2.3. Dana Alokasi Umum	397.037.063	414.882.484
2.4. Dana Alokasi Khusus	88.799.347	83.803.668
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	72.505.336	100.339.104
<b>B. Pembiayaan Daerah</b>	104.395.567	79.938.922
<b>JUMLAH</b>	<b>712.321.934</b>	<b>725.044.044</b>

Tabel 24.

**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENGELUARAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Belanja Daerah</b>	629.435.117	720.841.040
1. Belanja Tidak Langsung	229.277.445	289.087.423
1.1. Belanja Pegawai	123.529.431	175.332.017
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	6.148.200	9.813.140
1.5. Belanja Bantuan Sosial	5.970.000	2.895.000
1.6. Belanja Bagi Hasil	451.906	1.012.762
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	91.970.007	100.034.504
1.8. Belanja Tidak Terduga	1.207.901	-
2. Belanja Langsung	400.157.672	431.753.617
2.1. Belanja Pegawai	63.187.024	58.417.924
2.2. Belanja Barang dan Jasa	117.769.376	135.272.916
2.3. Belanja Modal	219.201.271	238.062.777
<b>M. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan</b>	82.886.817	4.203.004
<b>JUMLAH</b>	712.321.934	725.044.044

Tabel 25.

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENDAPATAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Pendapatan Daerah</b>	989.137.929	1.041.522.466
1. Pendapatan Asli Daerah	40.010.721	46.834.235
1.1. Pajak Daerah	14.862.695	8.566.087
1.2. Retribusi Daerah	13.671.532	22.528.898
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	493.140	658.609
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.983.354	15.080.641
2. Dana Perimbangan	806.178.364	852.854.631
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	13.414.038	9.480.445
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	26.553.156	34.401.562
2.3. Dana Alokasi Umum	558.773.483	583.567.690
2.4. Dana Alokasi Khusus	207.437.687	225.404.934
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	142.948.844	141.833.600
<b>B. Pembiayaan Daerah</b>	5.474.511	13.100.039
<b>JUMLAH</b>	994.612.440	1.054.622.505

Tabel 26.

**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

<b>JENIS PENGELUARAN</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>A. Belanja Daerah</b>	976.426.203	1.050.111.394
1. Belanja Tidak Langsung	442.890.661	496.434.576
1.1. Belanja Pegawai	279.749.897	304.855.977
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	2.433.850	6.030.943
1.5. Belanja Bantuan Sosial	1.839.200	3.076.100
1.6. Belanja Bagi Hasil	225.232	423.136
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	156.940.868	179.890.716
1.8. Belanja Tidak Terduga	1.701.614	2.157.704
2. Belanja Langsung	533.535.542	553.676.818
2.1. Belanja Pegawai	46.864.565	42.615.252
2.2. Belanja Barang dan Jasa	221.958.702	232.244.590
2.3. Belanja Modal	264.712.275	278.816.976
<b>N. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan</b>	18.186.237	4.511.111
<b>JUMLAH</b>	994.612.440	1.054.622.505

Tabel 27.

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Palu  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENDAPATAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Pendapatan Daerah</b>	1.316.087.928	2.176.218.360
1. Pendapatan Asli Daerah	267.401.948	235.922.535
1.1. Pajak Daerah	110.739.727	107.199.060
1.2. Retribusi Daerah	11.794.056	9.032.938
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.209.627	2.193.769
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	142.658.539	117.496.768
2. Dana Perimbangan	910.693.128	940.428.626
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	22.736.634	15.054.719
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	21.184.867	15.637.777
2.3. Dana Alokasi Umum	671.600.535	698.733.242
2.4. Dana Alokasi Khusus	195.171.092	211.002.888
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	137.992.852	999.867.199
<b>B. Pembiayaan Daerah</b>	71.473.484	195.688.412
<b>JUMLAH</b>	1.387.561.412	2.371.906.772

Tabel 28.

**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Palu  
Tahun 2018 – 2019 (ribu rupiah)**

JENIS PENGELUARAN	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>A. Belanja Daerah</b>	1.191.550.500	1.338.835.752
1. Belanja Tidak Langsung	529.634.595	544.785.928
1.1. Belanja Pegawai	519.532.991	525.868.255
1.2. Belanja Bunga	761.708	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	7.336.125	12.084.881
1.5. Belanja Bantuan Sosial	27.750	6.350.000
1.6. Belanja Bagi Hasil	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	366.750	186.132
1.8. Belanja Tidak Terduga	1.609.270	296.660
2. Belanja Langsung	661.915.905	794.049.824
2.1. Belanja Pegawai	63.410.463	65.152.921
2.2. Belanja Barang dan Jasa	417.168.202	415.792.341
2.3. Belanja Modal	181.337.241	313.104.562
<b>B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan</b>	196.010.912	1.033.071.020
<b>JUMLAH</b>	1.387.561.412	2.371.906.772



Sensus  
Penduduk  
2020

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 48 Palu 94114 Telp (0451) 483610, 483611, Fax (0451) 483612  
Website: <https://sulteng.bps.go.id>; email: [bps7200@bps.go.id](mailto:bps7200@bps.go.id)

ISSN 2354-7456



9 772354 745005